



PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jalan Raya Serang – Pandeglang Km.1 Curugsawer
Email : pnpandeglang@yahoo.co.id, Website : pn-pandeglang.go.id
Tlp. (0253) 201125, Fax. (0253) 201125, Pandeglang 42213

Pandeglang, 18 Januari 2023

Nomor : W29.U2/156 /PTIP.02.01/1/2022

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Pengiriman dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2022 Pengadilan Negeri Pandeglang

Yth.

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Di-

SERANG

Menindaklanjuti surat dari Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/4055/PR.05.08/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini kami kirimkan dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Negeri Pandeglang.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG


HENDHY EKA CHANDRA, SH.
NIP. 197610152003052001

Tembusan Kepada

- Arsip



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022



Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II

Jl. Raya Serang KM.I Curugsawer Pandeglang-Banten



Pengadilan Negeri Pandeglang @ info@pnPandeglang.go.id pn-pandeglang.go.id



Pengadilan Negeri Pandeglang pnpandeglang



0812-9035-1270

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunianya , dengan berakhirnya tahun 2022 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan pada tahun 2022. Alhamdulillah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pengadilan Negeri Pandeglang telah dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dari Pengadilan Negeri Pandeglang.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang aktivitas Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas – tugasnya, baik yang menyangkut tugas yustisial maupun non yustisial termasuk didalamnya masalah-masalah yang dihadapi.

Selain itu gambaran lebih lanjut mengenai Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan pertanggungjawaban kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2022 serta sebagai pelaporan pokok-pokok program kerja untuk tahun 2022.

Dalam menyusun laporan ini , kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, namun kami memahami betul laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangannya, oleh karenanya kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan laporan dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami buat, semoga bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini, kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kami berserah diri, semoga kita tetap berada dalam lindungan dan tuntunannya, Aamiin ya Robbal Alamin.

Pandeglang, 04 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang


HENDHY EKA CHANDRA, S.H.
NIP. 19810505 200312 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| BAB II A. Keadaan Perkara di Pengadilan..... | 3 |
| - Keadaan Perkara Tingkat Pertama..... | 3 |
| B. Penyelesaian Perkara..... | 4 |
| - Jumlah sisa perkara yang diputus..... | 4 |
| - Jumlah perkara yang diputus tepat waktu..... | 5 |
| - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya..... | 6 |
| hukum Banding, Kasasi dan PK..... | 6 |
| - Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi..... | 6 |
| - Jumlah perkara anak yang berhasil melalui..... | 7 |
| Diversi..... | 7 |
| C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)..... | 7 |
| - Posbakum..... | 7 |
| - Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu..... | 8 |
| - Perkara Prodeo..... | 8 |
| BAB III Sumber Daya Manusia..... | 9 |
| Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/gol/pendidikan..... | 10-11 |
| - Mutasi..... | 11 |
| - Promosi..... | 12 |
| - Pensiun..... | 12-13 |
| - Diklat..... | 13-14 |
| BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi.. | 15 |
| A. Pengelolaan Keuangan..... | 15 |
| B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana..... | 16-20 |
| C. Pengelolaan Teknologi Informasi..... | 21 |
| - Implementasi e-court..... | 21 |
| - Implementasi SIPP..... | 22 |
| - Implementasi e-Berpadu..... | 23 |

| | | |
|---------|--|-------|
| BAB V | Peningkatan Pelayanan Publik..... | 24 |
| | - Akreditasi Penjaminan Mutu..... | 24 |
| | - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)..... | 24-27 |
| | - Inovasi Pelayanan Publik..... | 28-31 |
| BAB VI | Pengawasan..... | 32 |
| | A. Internal..... | 32 |
| | B. Evaluasi..... | 33 |
| BAB VII | Penutup..... | 34 |
| | A. Kesimpulan..... | 34 |
| | B. Rekomendasi..... | 34-35 |

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Pandeglang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dilingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok :

1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik perkara-perkara pidana dan perdata di tingkat pertama
2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya
3. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan berdasarkan undang-undang

Dalam rangka melaksanakan Undang – undang yang diamanatkan tersebut maka Pengadilan Negeri Pandeglang menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan untuk tahun anggaran 2022 yang berisi, antara lain :

1. Laporan administrasi umum yaitu : Bidang Umum dan Keuangan, Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. Laporan Administrasi Perkara (Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Hukum).

Posisi Pengadilan Negeri dalam struktur satu atap dengan Mahkamah Agung menjadi tantangan ke depan yang harus dipikirkan dalam hal :

1. Menjunjung tinggi supremasi hukum demi tegaknya hukum, keadilan dan kepastian hukum.
2. Memberikan pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Akuntabilitas dan transparansi dalam proses peradilan.
4. Penegakan hukum secara merata dalam sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas Pengadilan mempunyai visi:

"MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG YANG AGUNG"

Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Pandeglang mempunyai misi, yaitu :

"Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum, meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan dan mewujudkan kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan". Dengan menjalankan seluruh kegiatan melalui program-program yang disesuaikan dengan rencana kerja Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang dimaksud visi dan misi Mahkamah Agung RI, dengan mempertegas visi Mahkamah Agung, yakni: "Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik".

Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Pandeglang telah menentukan rencana strategis. Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

BAB II
PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Keadaan Perkara Di Tahun 2022 Pada Pengadilan Negeri Pandeglang Dapat Dilihat Secara Rinci Pada Tabel Berikut :

| SATKER | PERKARA | SISA THN 2021 | MASUK THN 2022 | PUTUS THN 2022 | SISA THN 2022 | PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA THN 2022 | |
|---------------|---------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|--|--------|
| PN PANDEGLANG | Pidana | Biasa | 13 | 287 | 259 | 41 | 86,33% |
| | | Cepat | - | 2 | 2 | - | 100% |
| | | Anak | - | 14 | 14 | - | 100% |
| | | Pra Peradilan | - | 1 | 1 | - | 100% |
| | Perdata | Gugatan | 9 | 27 | 22 | 14 | 61,11% |
| | | Permohonan | 1 | 21 | 21 | 1 | 95,45% |
| | | Gugatan Sederhana | - | 8 | 8 | - | 100% |
| | | Perlawanan/ Bentahan | - | - | - | - | - |

B. PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Berikut Ini Rincian Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Di Pengadilan Negeri Pandeglang Di Tahun 2022

| SATKER | PERKARA | SISA PERKARA THN 2021 | SISA PERKARA THN 2021 YANG DIPUTUS THN 2022 | PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA | |
|------------------|---------|-------------------------|---|---------------------------------|------|
| PN PANDEGLANG | Pidana | Biasa | 13 | 13 | 100% |
| | | Cepat | - | - | - |
| | | Anak | - | - | - |
| | | Pra Peradilan | - | - | - |
| | Perdata | Gugatan | 9 | 8 | 100% |
| | | Permohonan | 1 | 1 | 100% |
| | | Gugatan Sederhana | - | - | - |
| | | Perlawanan/ Bentahan | - | - | - |

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Berikut Ini Rincian Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Di Pengadilan Negeri Pandeglang Pada Tahun 2022

| SATKER | PERKARA | JUMLAH PERKARA PUTUS THN 2022 | JUMLAH PERKARA DIPUTUS TEPAT WAKTU | JUMLAH PERKARA DIPUTUS TIDAK TEPAT WAKTU | PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA THN 2022 | |
|------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--------|
| PN PANDEGLANG | Pidana | Biasa | 259 | 246 | 13 | 94,98% |
| | | Cepat | 2 | 2 | - | 100% |
| | | Anak | 14 | 14 | - | 100% |
| | | Pra Peradilan | 1 | 1 | - | 100% |
| | Perdata | Gugatan | 22 | 15 | 7 | 68,18% |
| | | Permohonan | 21 | 21 | - | 100% |
| | | Gugatan Sederhana | 8 | 8 | - | 100% |
| | | Perlawanan/ Bentahan | - | - | - | - |

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGIJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

Berikut Ini Rincian Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK (Peninjauan Kembali) Di Pengadilan Negeri Pandeglang Pada Tahun 2022

| SATKER | PERKARA | JUMLAH PERKARA PUTUS THN 2022 | JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2022 TIDAK MENGAJUKAN BANDING | | JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2022 TIDAK MENGAJUKAN KASASI | | JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2022 TIDAK MENGAJUKAN PK | |
|---------------|---------|-------------------------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|
| | | | JUM-LAH | PERSEN TASE | JUM-LAH | PERSEN TASE | JUM-LAH | PERSEN TASE |
| PN PANDEGLANG | Biasa | 259 | 245 | 94,59 % | 254 | 98,06 % | 259 | 100% |
| | Pidana | | | | | | | |
| | Anak | 14 | 14 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% |
| | Perdata | | | | | | | |
| | Gugatan | 22 | 20 | 90,90 % | 21 | 95,45 % | 22 | 100% |

3. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Berikut Ini Rincian Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi Di Pengadilan Negeri Pandeglang Pada Tahun 2022

| SATKER | JUMLAH PERKARA PERDATA YANG DIMEDIASI DI TH.2022 | STATUS KEBERHASILAN DALAM MEDIASI | | | DALAM PROSES |
|---------------|--|-----------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| | | BERHASIL | TIDAK BERHASIL | TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN | |
| PN PANDEGLANG | 24 | 1 | 23 | - | 4 |

3. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Berikut ini rincian jumlah perkara pidana anak pada pengadilan negeri pandeglang yang berhasil didiversi pada tahun 2022

| SATKER | JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK TH.2022 | JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG DIDIVERSI TH.2022 | STATUS KEBERHASILAN DIVERSI | | | DALAM PROSES |
|---------------|------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| | | | BERHASIL | TIDAK BERHASIL | TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN | |
| PN PANDEGLANG | 14 | - | - | - | 14 | - |

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Pengadilan Negeri Pandeglang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI terhitung tanggal 16 Desember 2016 , Nomor : TAPM.060/QMR/Sertifikat/12/2016 Terakreditasi dengan nilai " B " , Dan selanjutnya Pengadilan Negeri Pandeglang mendapatkan kembali Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI terhitung tanggal 18 Juli 2017, Nomor TAPM 083/QMR/Sertifikat/7/2017 Terakreditasi dengan nilai " A " (Excellent), maka dengan adanya Sertifikat ISO Pengadilan Negeri Pandeglang akan lebih maju ditahun mendatang.

- POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) adalah suatu layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang fungsinya adalah memberikan pelayanan hukum yang berupa informasi dan juga konsultasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam tahun anggaran 2022, Pengadilan Negeri Pandeglang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Pandeglang (417845) mendapatkan alokasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 31.200.000,-. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Pandeglang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Geradin yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Pandeglang dengan jumlah layanan sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) jam layanan, realisasi anggaran untuk Honor Advokat / Pengacara piket pada tahun anggaran 2022 tercapai **100%** (seratus persen).

- **SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU**

Selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Pandeglang tidak melaksanakan Sidang Keliling ataupun Pelayanan Terpadu.

- **PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)**

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Pandeglang (417845) untuk Tahun Anggaran 2022, Pengadilan Negeri Pandeglang tidak mendapat alokasi dana untuk pembiayaan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara).

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia bidang Teknis Yudisial di Pengadilan Negeri Pandeglang berjumlah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, yang terdiri dari :

| No | Nama | Jabatan | Gol |
|-----|--------------------------------------|---------------------|-------|
| 1. | Hendhy Eka Chandra, SH. | Ketua / Hakim | IV.a |
| 2. | Indira Patmi, SH., MH. | Wakil Ketua / Hakim | IV.b |
| 3. | Ariyan, SH.,MH. | Hakim | III.d |
| 4. | Anggi Prayurisman, SH., MH. | Hakim | III.d |
| 5. | Ida Adriana, SH. | Hakim | III.d |
| 6. | Panji Answinartha, SH., MH. | Hakim | III.d |
| 7. | Madela Natalia Sai Reeve, SH., MH. | Hakim | III.d |
| 8. | Agung Darmawan, SH., MH. | Hakim | III.d |
| 9. | Suluh Pardamaian, SH., MH. | Hakim | III.d |
| 10. | Dhitya Kusumaning Prawarni, SH., MH. | Hakim | III.d |
| 11. | Eva Khoerizqiah, SH. | Hakim | III.d |
| 12. | Sugandi Syarif, SH., MH. | Panitera | III.d |
| 13. | Resya, SH., MH. | Panmud Hukum | IV.a |
| 14. | Agus Prasetyo, SH., MH. | Panmud Perdata | III.d |
| 15. | Saudur Derit Krisyanna, SH., MH. | Panmud Pidana | III.c |
| 16. | M. Nanang Gunawan | Panitera Pengganti | III.c |
| 17. | Ari Wahyudianto, SH. | Panitera Pengganti | III.c |
| 18. | Arigayota Darhadi Naradana, SH. | Panitera Pengganti | III.a |
| 19. | Maria Sakura, SH. | Panitera Pengganti | III.c |
| 20. | Indah Agustriana, SH., MH. | Panitera Pengganti | III.c |
| 21. | Gita Nungky Natalie, SH. | Panitera Pengganti | III.b |
| 22. | Rita Safitri, SH. | Panitera Pengganti | III.c |
| 23. | Sagitarina Novianty, SH. | Panitera Pengganti | III.c |
| 24. | R. Dudi Darmaji, SH. | Juru Sita | III.c |
| 25. | Matsani | Juru Sita Pengganti | II.b |

Sumber daya manusia bidang Non Teknis Yudisial di Pengadilan Negeri Pandeglang berjumlah sebanyak 12 (dua belas) orang, yang terdiri dari :

| No | Nama | Jabatan | Gol |
|-----|----------------------------------|---|-------|
| 1. | Elvis Reza Almany, ST., SH. | Sekretaris | III.d |
| 2. | Satria Ari Wibowo, A.Md. | Kasubbag Umum dan Keuangan | III.b |
| 3. | Ari Sulaeman, ST. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | III.c |
| 4. | Sopian Badruzaman, SH. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | III.c |
| 5. | Nita Yunita, SH. | Pranata Keuangan APBN | III.b |
| 6. | Iis Setiawati, SH. | Pranata Keuangan APBN | III.b |
| 7. | Tapanuli Utara | Pengelola Kepegawaian | III.a |
| 8. | Hanny Miranda, SE. | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | III.a |
| 9. | Fahmi Afandi, A.Md. | Pengelola Perkara | II.c |
| 10. | Dina Uli Simbolon, SH. | Analisis Perkara Peradilan | III.a |
| 11. | Angga Pratama, SH. | Analisis Perkara Peradilan | III.a |
| 12. | Maria Meiranda Situmorang, A.Md. | Pengelola Perkara | II.c |

Komposisi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Pandeglang berdasarkan pangkat / golongan adalah :

| No | Pangkat / Golongan | Jumlah |
|---------------|--------------------------------|-----------|
| 1. | Pembina / IV.a | 2 |
| 2. | Penata Tingkat I / III.d | 13 |
| 3. | Penata / III.c | 8 |
| 4. | Penata Muda Tingkat I / III.b | 4 |
| 5. | Penata Muda / III.a | 5 |
| 6. | Pengatur Muda Tingkat I / II.b | 1 |
| JUMLAH | | 33 |

Komposisi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Pandeglang berdasarkan tingkat pendidikan adalah :

| No | Pendidikan | Jumlah |
|----|---------------|-----------|
| 1. | Strata II | 11 |
| 2. | Strata I | 19 |
| 3. | Diploma III | 4 |
| 4. | S M U | 2 |
| | JUMLAH | 36 |

Komposisi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Pandeglang Kenaikan pangkat dan Kenaikan gaji berkala tahun 2022 adalah :

| No | Per April dan Oktober 2022 | Jumlah |
|----|----------------------------|----------|
| 1. | 4 Orang (Per April) | 4 |
| 2. | 1 Orang (Per Oktober) | 1 |
| | JUMLAH | 5 |

Komposisi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Pandeglang Kenaikan gaji berkala tahun 2022 adalah :

| No | Tahun 2022 | Jumlah |
|----|---------------|----------|
| 1. | 9 | 9 |
| | JUMLAH | 9 |

– **Mutasi**

Dalam tahun 2022, pada Pengadilan Negeri Pandeglang telah terjadi mutasi keluar yaitu:

1. Djoko Santoso, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
2. Rosa Maulidyan, S.Sos. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat
3. Intan Febrianti, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Banten

4. Frida Apriani, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat

Dalam tahun 2022, pada Pengadilan Negeri Pandeglang telah terjadi mutasi masuk yaitu:

1. Hendhy Eka Chandra, SH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung mutasi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang
2. Sugandi Syarif, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Kalianda mutasi sebagai Panitera Pengadilan Negeri Pandelang
3. M. Nanang Gunawan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung mutasi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang

- **Promosi**

Promosi jabatan pada Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Jara Lumbanraja, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB, Jawa Barat
2. Resya, SH., MH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II, Banten
3. Titis Tri Wulandari, SH., S.Psi., M.Hum. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Kelas IB, Jawa Tengah
4. Saudur Derit Krisyanna, SH., MH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang mutasi sebagai Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II, Banten

- **Pensiun**

Pegawai Pengadilan Negeri Pandeglang yang pensiun pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Z. Arifin Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang pensiun per 1 Juli 2022

2. Haesifin Berhayan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang pensiun per 1 Juli 2022

- **Diklat**

Hakim / Pegawai Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Hendhy Eka Chandra, SH Mengikuti pelatihan online tentang Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia pada tanggal 18 April 2022 sampai dengan 17 Mei 2022, dikantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Mengikuti pelatihan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Hakim Mahkamah Agung pada tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 14 Oktober 2022, di Diklat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
2. Nita Yunita, SH. Mengikuti pelatihan Champion Meeting – Court Excellence Training pada tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan 17 Januari 2022, di Bali
3. Hanny Miranda, SE Mengikuti pelatihan dasar CPNS Distance Learning tahap satu 31 Januari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022, tahap dua 14 Februari 2022 sampai dengan 30 April 2022, dengan metode belajar online class, di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang
4. Fahmi Afandi, A.Md Mengikuti pelatihan dasar CPNS Distance Learning tahap satu 21 Februari 2022 sampai dengan 8 Maret 2022, tahap dua 9 Maret 2022 sampai dengan 31 Mei 2022, dengan metode belajar online class, di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang
5. Anggi Prayurisman, SH.,MH Mengikuti pelatihan tentang Teknis Yudisial Kejahatan Maritim; tahap satu (online) tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 18 Maret 2022, klasikal tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan 26 Maret 2022 di Batam, Kepulauan Riau
6. Agung Darmawan, SH.,MH Mengikuti pelatihan tentang Teknis Yudisial Kejahatan Maritim; tahap satu (online) tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 18 Maret 2022, klasikal tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan 26 Maret 2022 di Batam, Kepulauan Riau

7. Eva Khoerizqiah SH Mengikuti pelatihan tentang Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); tahap dua (online) tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2022, tahap tiga (klasikal) tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan 29 Mei 2022 di Diklat Mahkamah Agung, Bogor
8. Resya, SH.,MH Mengikuti pelatihan singkat Panitera Pengganti (online) pada tanggal 5 April 2022 sampai dengan 7 April 2022, di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang
9. Saudur Derit Krisyanna, SH.,MH Mengikuti pelatihan singkat Panitera Pengganti (online) pada tanggal 12 April 2022 sampai dengan 14 April 2022, di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang
10. Frida Apriani, SH Mengikuti pelatihan singkat Panitera Pengganti (online) pada tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan 24 Maret 2022, di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang
11. Jara Lumbanraja, SH.,MH; Resya, SH.,MH; Agus Prasetyo, SH; Rita Safitri, SH Mengikuti bimbingan teknis Kepaniteraan PT Banten pada tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2022, di Hotel Aston, Cilegon, Banten
12. Rita Safitri, SH dan Sagitarina Novianty, SH Mengikuti pelatihan singkat Panitera Pengganti (online) pada tanggal 12 April 2022 sampai dengan 14 April 2022, di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang
13. Ari Wahyudianto, SH Mengikuti pelatihan singkat Panitera Pengganti (online) pada tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 17 Maret 2022, di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang
14. Agus Prasetyo, SH dan Arigayota D. N. Kala, SH Mengikuti pelatihan singkat Panitera Pengganti (online) pada tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 17 Maret 2022, di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang
15. Gita Nungky Natalie, SH Mengikuti pelatihan singkat Panitera Pengganti (online) pada tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan 24 Maret 2022, di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang
16. R. Dudi Darmaji, SH.,MH dan Haesifin Berhayan Mengikuti pelatihan online tentang Teknis Yudisial Juru Sita pada tanggal 1 November 2021 sampai dengan 12 November 2021, di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang

BAB IV

**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI**

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 DAN 03
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG TAHUN 2022

| No. | JENIS KEGIATAN | PAGU AWAL 2022 | PAGU SETELAH REVISI | REALISASI | PERSENTASE |
|-----|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | Layanan Dukungan Manajemen Peradilan | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% |
| 2. | Gaji dan Tunjangan | 3.984.143.000 | 4.634.143.000 | 4.575.729.433 | 98,74% |
| 3. | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 1.544.121.000 | 1.604.601.000 | 1.585.702.320 | 98,82% |
| 4. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 222.500.000 | 222.500.000 | 222.158.650 | 99,85% |
| 5. | Pos Bantuan Hukum | 31.200.000 | 31.200.000 | 31.200.000 | 100% |
| 6. | Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama | 111.720.000 | 111.720.000 | 111.025.000 | 99,38% |
| | Total | 5.898.684.000 | 6.609.164.000 | 6.530.815.400 | 99,46% |

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Adapun ruangan yang tersedia di gedung kantor Pengadilan Negeri Pandeglang termuat dalam daftar sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | Ruang Ketua | 1 |
| 2 | Ruang Wakil Ketua | 1 |
| 3 | Ruang Sekretaris | 1 |
| 4 | Ruang Panitera | 1 |
| 5 | Ruang Hakim | 2 |
| 6 | Ruang Subbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana | 1 |
| 7 | Ruang Subbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan | 1 |
| 8 | Ruang Server | 1 |
| 9 | Ruang Perpustakaan | 1 |
| 10 | Ruang Arsip Hukum | 3 |
| 11 | Ruang Panitera Pengganti | 1 |
| 12 | Ruang Ramah Anak | 1 |
| 13 | Pantry | 1 |
| 14 | Ruang Subbag Umum dan Keuangan | 1 |
| 15 | Ruang Kepaniteraan Hukum | 1 |
| 16 | Ruang Kepaniteraan Pidana | 1 |
| 17 | Ruang Kepaniteraan Perdata | 1 |
| 18 | Ruang Mediasi dan Diversi | 1 |
| 19 | Ruang Tahanan | 3 |
| 20 | Ruang Sidang | 4 |
| 21 | Ruang Saksi Anak | 1 |
| 22 | Ruang Laktasi | 1 |
| 23 | Ruang Barang Bukti | 1 |
| 24 | Ruang Kesehatan | 1 |
| 25 | Ruang Pos Bantuan Hukum | 1 |
| 26 | Ruang Tunggu Jaksa | 1 |
| 27 | Lobby | 1 |
| 28 | Ruang Tunggu Pengunjung | 1 |
| 29 | Musholla | 1 |
| 30 | Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 |
| 31 | Pojok E-Court | 1 |

| | | |
|----|--------------------|---|
| 32 | Ruang Tamu Terbuka | 1 |
| 33 | Gudang | 2 |
| 34 | Pos Satpam | 1 |

Rumah dinas pada Pengadilan Negeri Pandeglang termuat dalam daftar sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah | KONDISI | | | Ket |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------|-------------|-----|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| 1 | Rumah Dinas Ketua | 1 | | √ | | |
| 2 | Rumah Dinas Wakil Ketua | 1 | | √ | | |
| 3 | Rumah Dinas Panitera | 1 | | √ | | |
| 4 | Rumah Dinas Hakim | 9 | | | √ | |

Fasilitas Perkantoran Pengadilan Negeri Pandeglang termuat dalam daftar sebagai berikut :

| No | Sarana/Prasarana Alat Pengolah Data Dan Komunikasi | Jumlah | Keterangan |
|----|--|------------------|------------|
| 1 | Access Point | 2 Unit | |
| 2 | CCTV | 1 Unit(12 Titik) | |
| 3 | Facsimile | 1 Unit | |
| 4 | Infocus | 1 Unit | |
| 5 | Laptop/Notebook | 22 Unit | |
| 6 | P.C Unit | 50 Unit | |
| 7 | PABX | - | |
| 8 | Pesawat Telepon | 2 Unit | |
| 9 | Printer | 32 Unit | |
| 10 | Router | 1 Unit | |
| 11 | Scanner | 4 Unit | |
| 12 | Server | 2 Unit | |
| 13 | Switch | 12 Unit | |
| 14 | UPS | 7 Unit | |
| 15 | Wireless Access Point | 8 Unit | |
| 16 | Mesin Ketik | 2 Unit | |

| No | Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran | Jumlah | Keterangan |
|----|---|----------|------------|
| 1 | A.C. Split | 33 Unit | |
| 2 | A.C. Window | - | |
| 3 | A.C. Central | 2 Unit | |
| 4 | A.C. Portable | - | |
| 5 | Amplifier | - | |
| 6 | Alat Detektor Barang Terlarang/X-Ray | 1 Unit | |
| 7 | Alat Pengaman/Sinyal | - | |
| 8 | Alat rumah tangga lainnya | - | |
| 9 | Alat rumah tangga lainnya (home use) | 1 Unit | |
| 10 | Bangku Panjang Besi/Metal | 17 Unit | |
| 11 | Bangku Panjang Kayu | 16 Unit | |
| 12 | Bingkai foto | - | |
| 13 | Brandkas | 2 Unit | |
| 14 | Buffet | - | |
| 15 | Camera Digital | 1 Unit | |
| 16 | Digital Keyboard Technics/ Organ | - | |
| 17 | Dispenser | 1 Unit | |
| 18 | Exhause Fan | - | |
| 19 | Filling Cabinet Besi | 19 Unit | |
| 20 | Gambar Presiden/Wakil Presiden | - | |
| 21 | Genset | 1 Unit | |
| 22 | Gordyn/Kray | 1 Unit | |
| 23 | Jam Elektronik | 5 Unit | |
| 24 | Jet Pump | - | |
| 25 | Kaca Hias | - | |
| 26 | Kasur / Spring bed | - | |
| 27 | Kipas Angin | 2 Unit | |
| 28 | Kompore gas (alat dapur) | - | |
| 29 | Kursi Besi/Metal | 133 Unit | |
| 30 | Kursi Kayu | 34 Unit | |
| 31 | Lambang Garuda Pancasila | 3 Unit | |
| 32 | Lambang Instansi | 1 Unit | |
| 33 | Layar Film/Proyektor | - | |
| 34 | Lemari Besi/Metal | 52 Unit | |
| 35 | Lemari Es | - | |

| | | |
|----|-------------------------------------|----------|
| 36 | Lemari Kayu | 19 Unit |
| 37 | Lensa Kamera | - |
| 38 | Loudspeaker | - |
| 39 | Meja Kerja Besi/Metal | - |
| 40 | Meja Kerja Kayu | 103 Unit |
| 41 | Meja Komputer | 7 Unit |
| 42 | Meja makan kayu | 1 Unit |
| 43 | Meja Rapat | 17 Unit |
| 44 | Meja Resepsionis | - |
| 45 | Mesin Absensi | 2 Unit |
| 46 | Mesin cuci | - |
| 47 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 1 Unit |
| 48 | Meubelair lainnya | - |
| 49 | Microphone/wireless MIC | - |
| 50 | Mimbar/Podium | - |
| 51 | Overhead Projector | - |
| 52 | Palu Sidang | - |
| 53 | Papan Visual/Papan Nama | 9 Unit |
| 54 | Penyemprot tangan (hand sprayer) | - |
| 55 | Rak Besi | 19 Unit |
| 56 | Rak Kayu | 11 Unit |
| 57 | Rak piring alumunium | - |
| 58 | Rambu-rambu | - |
| 59 | Sice | 12 Unit |
| 60 | Sirine | - |
| 61 | Sound System | 5 Unit |
| 62 | Tabung gas | - |
| 63 | Tangki Air | - |
| 64 | Tape Recorder | 1 Unit |
| 65 | Televisi | - |
| 66 | Tempat tidur kayu | - |
| 67 | Tripod Kamera | - |
| 68 | Troli | - |
| 69 | White Board | 13 Unit |

Kendaraan dinas pada Pengadilan Negeri Pandeglang termuat dalam daftar sebagai berikut :

| No | Uraian | Tahun Perolehan | Kondisi | | | Ket |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------|--------------|-------------|------------------------------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| Kendaraan Roda Empat | | | | | | |
| 1 | Toyota Kijang LSX | 2003 | √ | | | |
| 2 | Toyota Kijang Innova | 2008 | √ | | | |
| 3 | Toyota Fortuner | 2019 | √ | | | Pinjam pakai dari Pemda Pandeglang |
| Kendaraan Roda Dua | | | | | | |
| 1 | Suzuki Shogun 125 cc | 2005 | | √ | | |
| 2 | Suzuki Shogun 125 cc | 2005 | | √ | | |
| 3 | Suzuki Shogun 125 cc | 2008 | | √ | | |
| 4 | Honda Mega Pro | 2007 | | √ | | |
| 5 | Honda Mega Pro | 2008 | | √ | | |
| 6 | Honda Mega Pro | 2008 | | √ | | |
| 7 | Honda Mega Pro | 2008 | | √ | | |
| 8 | Honda Mega Pro | 2009 | | √ | | |

Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2019 mendapatkan transfer masuk dari Mahkamah Agung berupa Alat Pengolah Data sebagai pendukung e-court dan e-litigasi yang berupa :

| No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Server | 1 Unit | |
| 2 | Rak Server | 1 Unit | |
| 3 | Personal Computer | 4 Unit | |
| 4 | Touch Screen | 1 Unit | |
| 5 | UPS Battery | 4 Unit | |

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi (417844) Pengadilan Negeri Pandeglang tahun anggaran 2022 terdapat belanja modal pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa Komputer PC sebanyak 11 (sebelas) unit, Terdapat pemberian komputer PC 6 (enam) unit, laptop 4 unit, Sepeaker 4 (empat) unit, Camera Webcam 1 (satu) unit, microphone 8 (delapan) unit, UPS 1 (unit) dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta tidak terdapat penghapusan sarana dan prasana dalam tahun 2022

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum

Lahirnya aplikasi e-Court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan e-Court menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak berperkara.

e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Ruang lingkup aplikasi e-Court adalah Pendaftaran Perkara Online (e-Filing), Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM), Pemanggilan Elektronik (e-Summons) dan Persidangan Online (e-Litigation).

Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan e-Court, hal ini dibuktikan dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2022 sebanyak 27 perkara gugatan, 8 perkara gugatan sederhana dan 22 perkara permohonan telah menggunakan e-Court. Di samping itu, untuk mendukung penerapan e-Court pada Pengadilan Negeri Pandeglang, disediakan pula Pojok E-Court yang dapat difungsikan para pencari keadilan untuk keperluan e-Court.

Selain terdapat pojok e-Court, penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Pandeglang juga didukung oleh petugas yang bersiap untuk membantu jika mengalami kendala dalam mengoperasikan e-Court, serta menjawab informasi e-Court secara keseluruhan.

– **Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara pengadilan tingkat pertama. Layanan informasi berbasis teknologi ini di dalamnya terdapat pencatatan informasi yang sangat lengkap diantaranya Tahapan Perkara, Status Perkara, Biaya Perkara, Jadwal Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk memperbaharui informasi perkara dengan mudah dan cepat.

Untuk memantau penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), secara umum penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pandeglang telah berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan nilai rasio penanganan perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada tanggal 31 Desember 2022 Pengadilan Negeri Pandeglang berada pada urutan 311 dengan rincian Nilai Kinerja sebesar 142.78 point, Nilai Kepatuhan sebesar 529.19 point, Nilai Kelengkapan sebesar 93.48 point, Nilai Kesesuaian sebesar 187.08 point dan nilai akhir

Evaluasi Implementasi SIPP pada tanggal 31 Desember 2022 bernilai 952.53 point.

– **Implementasi E-Berpadu di Lingkungan Peradilan Umum**

Lahirnya aplikasi e-Berpadu tidak terlepas dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239 Tahun 2022. Aplikasi e-Berpadu merupakan perwujudan dari implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239 Tahun 2022 merupakan inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan e-Berpadu menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak berperkara.

e-Berpadu adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap Kepolisian, Kejaksaan, Rutan(Rumah Tahanan) dan Masyarakat dalam hal pelimpahan berkas perkara pidana secara online, permohonan izin sita secara online, permohonan izin geledah secara online, permohonan perpanjangan penahanan secara online, izin besuk secara online, izin pinjam pakai barang bukti secara online, pembantaran secara online dan diversifikasi secara online.

Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan e-Berpadu, hal ini dibuktikan dengan jumlah penetapan perpanjangan penahanan 30 penetapan yang berhasil, penetapan permohonan izin sita 71 penetapan yang berhasil, penetapan permohonan izin geledah 13 penetapan yang berhasil, penetapan permohonan pembantaran 1 penetapan yang berhasil dan penetapan izin pinjam pakai 1 penetapan yang berhasil selama tahun 2022 (Data Tersebut Per 31 Desember 2022)

Penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Pandeglang juga didukung oleh petugas yang bersiap untuk membantu jika mengalami kendala dalam mengoperasikan e-Berpadu, serta menjawab informasi e-Berpadu secara keseluruhan.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

– Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan sebuah program yang pertama kali dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2008, diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul / Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE).

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri Pandeglang dilakukan oleh Tim Asessor Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Tinggi Banten yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Setelah dilakukan Asistensi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten akhirnya Pengadilan Negeri Pandeglang mendapatkan sertifikat Akreditasi dengan nilai "A" (Excellent) sesuai Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badilum Nomor : 61/DJU/SK/OTO1.3/4/2022 Terhitung Pertanggal 04 April 2022.

– Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan.

Perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Negeri melalui satu pintu.

Untuk mewujudkan pelayanan tersebut, Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Pandeglang dilaksanakan dengan prinsip Keterpaduan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Koordinasi, Akuntabilitas dan Aksesibilitas.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Pandeglang terdiri dari empat petugas yang terdiri dari :

1. Petugas Kepaniteraan Muda Pidana, yang memiliki tugas melayani :
 - Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, cepat /lalu lintas dari Penuntut Umum / Penyidik
 - Menerima pendaftaran permohonan praperadilan
 - Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi
 - Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
 - Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
 - Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan
 - Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
 - Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
 - Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan

- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana
2. Petugas Kepaniteraan Muda Perdata, yang memiliki tugas melayani :
- Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa
 - Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana
 - Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan
 - Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek
 - Menerima Pendaftaran perkara permohonan
 - Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali
 - Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali
 - Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara
 - Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan
 - Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi
 - Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi
 - Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi
 - Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi
 - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata
3. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum, yang memiliki tugas melayani :
- Permohonan pendaftaran pendirian CV
 - Permohonan waarmarking surat-surat
 - Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
 - Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset

- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
- Permohonan pendaftaran surat kuasa
- Permohonan legalisasi surat
- Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 Tahun 2022
- Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon
- Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan
- Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum

Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Pandeglang sudah menggunakan Aplikasi eraterang, hal ini dibuktikan dari total 44 pembuatan surat keterangan sudah menggunakan Aplikasi eraterang.

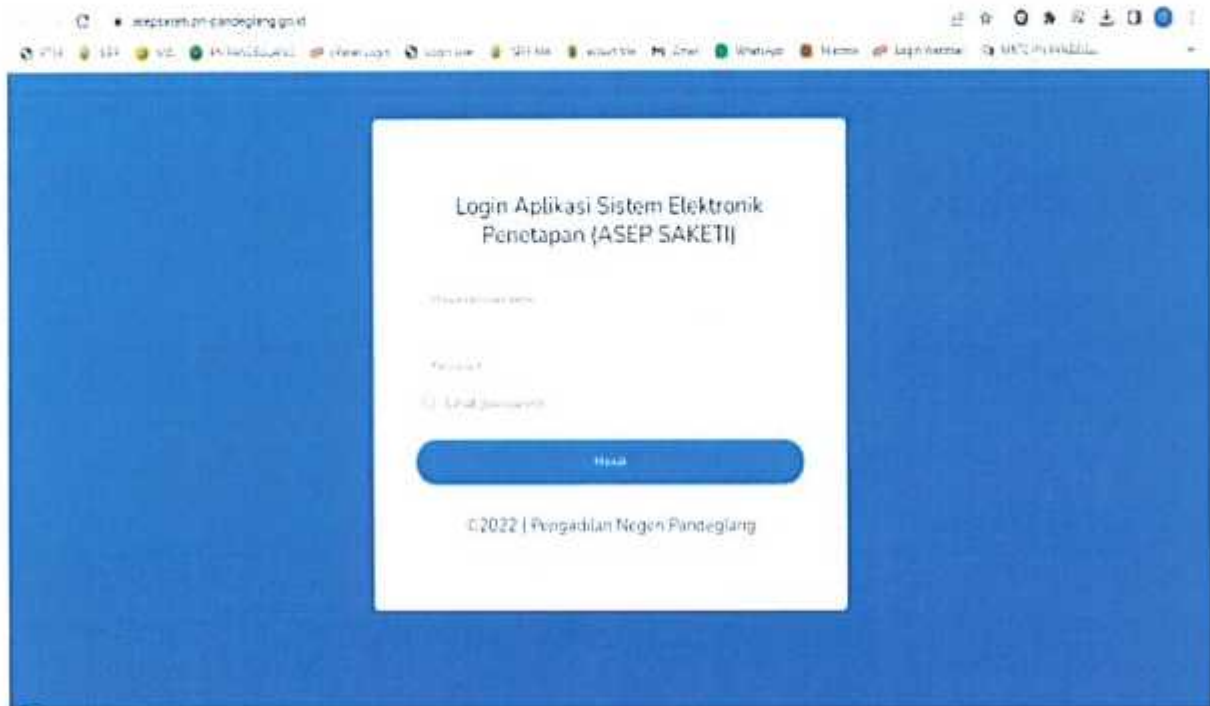
4. Petugas Sub Bagian Umum dan Keuangan, yang memiliki tugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pandeglang.

- Inovasi Pelayanan Publik

Dimulai Pada Tanggal 03 Januari 2022 Pengadilan Negeri Pandeglang Mengembangkan Beberapa Aplikasi Inovasi Untuk Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Pandeglang Diantaranya Adalah :

1. Aplikasi Sistem Elektronik Penetapan Permohonan Perdata (ASEP Saketi) Berbasis Web
2. Elektronik Pengaduan Internal Pengadilan (e-PIP) Berbasis Web
3. Sistem Informasi Pengadilan (SIP) PN Pandeglang Berbasis Android

1. Aplikasi Sistem Elektronik Penetapan Permohonan Perdata (ASEP Saketi)



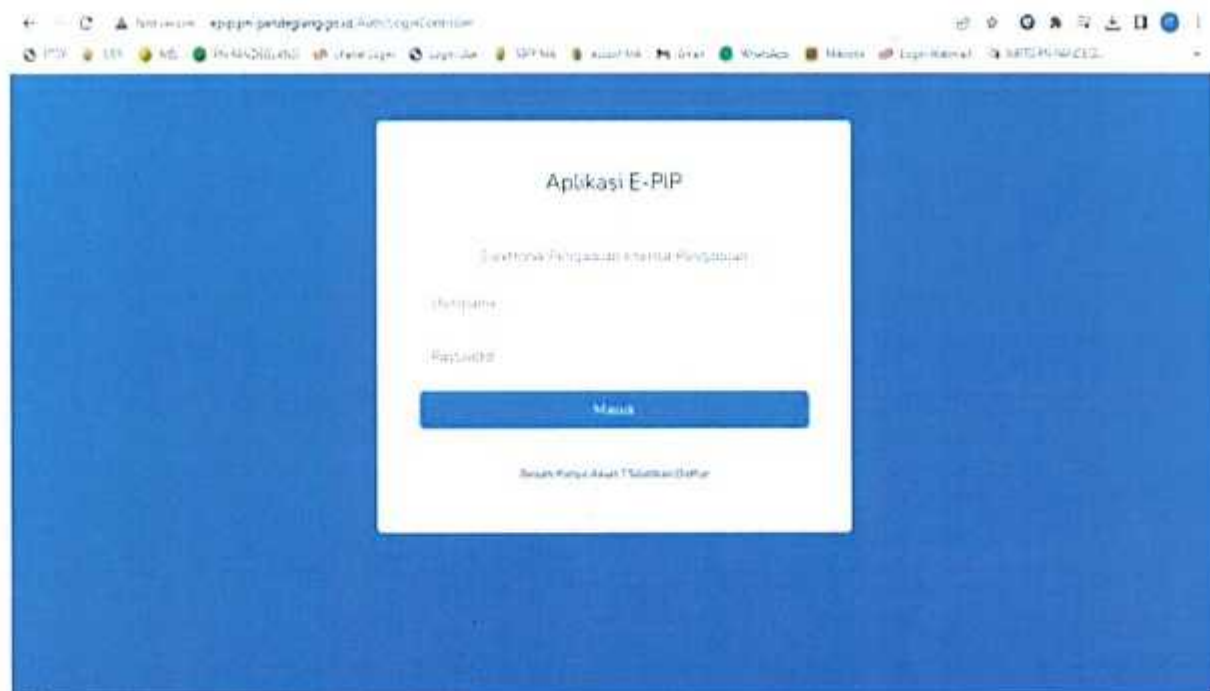
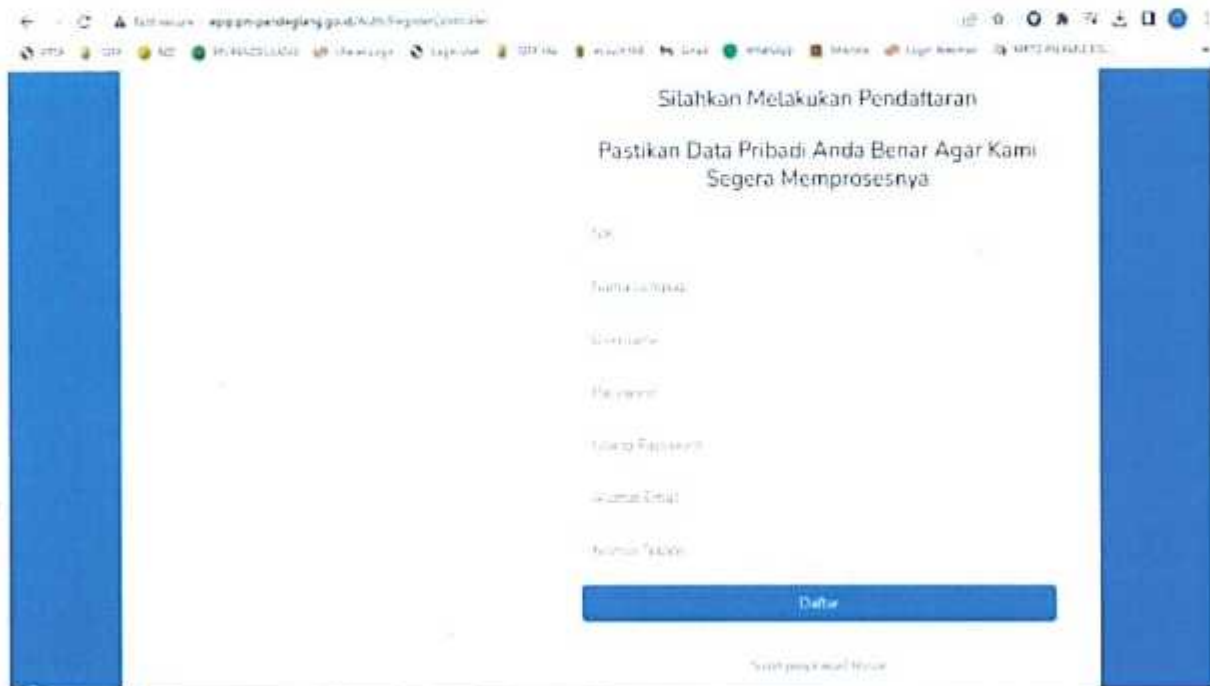
Aplikasi Sistem Elektronik Penetapan Permohonan Perdata (ASEP Saketi)

Pengadilan Negeri Pandeglang adalah aplikasi yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil(Disdukcapil) Terkait Pembaruan Akta Ganti Nama maka dari itu dibuat aplikasi Sistem Elektronik Penetapan Permohonan Perdata (ASEP Saketi) untuk mengirimkan penetapan/salinan putusan ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil(Disdukcapil) agar mempermudah proses pelayanan publik kepada masyarakat khususnya wilayah Kab. Pandeglang.

I. Fitur Sistem Elektronik Penetapan Permohonan Perdata (ASEP Saketi)

- Input/Kirim Data atau Dokumen Penetapan/Salinan Putusan (user pengadilan)
- Download Dokumen Penetapan/Salinan Putusan yang sudah di Tanda Tangan Secara Elektronik (user disdukcapil)
- Tambah Data Jenis Permohonan
- Tambah User/Pengguna
- Data Laporan

2. Elektronik Pengaduan Internal Pengadilan (e-PIP)



Elektronik Pengaduan Internal Pengadilan (e-PIP) Pengadilan Negeri Pandeglang Yaitu Aplikasi untuk mempermudah pengguna pengadilan/pencari keadilan dalam hal fasilitas atau sarana prasarana khususnya di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Pandeglang, para pencari keadilan bisa mengajukan pengaduan internal melalui

aplikasi epip yang sudah disediakan oleh pihak Pengadilan Negeri Pandeglang link aplikasi tersebut sudah di pasang di website resmi Pengadilan Negeri Pandeglang apabila ada fasilitas yang sudah tidak layak digunakan atau belum ada sarana prasarana yang benar-benar dibutuhkan oleh para pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang bisa mengajukan pengaduan di aplikasi tersebut.

II. Fitur Pengaduan Internal Pengadilan (e-PIP)

- Data Profile
- Tambah Petugas Pengadilan (User Pengadilan)
- Data Pengaduan Masuk (User Pengadilan)
- Data Pengaduan Proses (User Pengadilan)
- Data Pengaduan Ditolak (User Pengadilan)
- Data Pengaduan Selesai (User Pengadilan)
- Data Laporan (User Pengadilan)
- Tambah Pengaduan (User Pengguna)
- Status Pengaduan (User Pengguna)
- Data Hasil Pengaduan (User Pengguna)

3. Sistem Informasi Pengadilan (SIP) PN Pandeglang



Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Negeri Pandeglang Yaitu Aplikasi berbasis android bertujuan untuk mempermudah pencari keadilan untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang, aplikasi tersebut sudah dilengkapi dengan 3 pelayanan kepaniteraan yaitu kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana dan kepaniteraan hukum. Para pencari keadilan bisa mencari informasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

III. Sistem Informasi Pengadilan (SIP) PN Pandeglang

- Informasi Pelayanan Kepaniteraan Perdata
- Informasi Pelayanan Kepaniteraan Pidana
- Informasi Pelayanan Kepaniteraan Hukum

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 bahwa Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang berada langsung dibawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Pandeglang melaksanakan pengawasan melekat dan fungsional yang telah dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua serta Panitera dan Sekretaris. Untuk hakim-hakim pelaksanaan pengawasan melekat pada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya, sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Pandeglang. Hakim Pengawas Bidang ini telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan secara berkala yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua Pengadilan.

Dalam melaksanakan pengawasan internal, Pengadilan Negeri Pandeglang telah melaksanakan pengawasan internal antara lain :

1. Melaksanakan rapat bulanan secara rutin yang membahas antara lain :
 - Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut
 - Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai

- Laporan minutası perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- 2. Secara berkala dilakukan rapat khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti serta rapat khusus Jusrita / Jusrita Pengganti untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya
- 3. Secara berkala melakukan pemeriksaan / peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing
- 4. Pengawasan kedisiplinan dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai
- 5. Secara berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya

B. Evaluasi

Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Pandeglang telah berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang juga telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan arahan-arahan, selanjutnya membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Wakil Ketua Pengadilan setiap bulan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang, pimpinan juga melakukan evaluasi melalui forum rapat bulanan yang membahas kinerja melalui aplikasi-aplikasi pendukung baik di bagian Kepaniteraan maupun di bagian Kesekretariatan.

Hasil evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian, masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut :

1. Masih banyaknya Panitera Pengganti yang diperbantukan di Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum, hal ini disebabkan karena kurangnya pegawai pada Pengadilan Negeri Pandeglang
2. Masih banyak rumah dinas yang rusak berat dan harus segera diperbaiki
3. DIPA yang akan datang agar lebih ditingkatkan lagi, sehingga dana operasional kegiatan kantor bisa tercukupi.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Pandeglang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus meningkatkan pelayanan publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas
2. Pengadilan Negeri Pandeglang telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan semestinya
4. Pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Pandeglang telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
5. Dalam meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, E-Court Era Terang dan E-Berpadu
6. Peningkatan mutu menuju profesionalisme bagi karyawan dan karyawan Pengadilan Negeri Pandeglang telah dilaksanakan, dengan cara mengikuti pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi dan juga dengan cara mengikuti sertakan pendidikan dan latihan serta penataran-penataran yang diadakan oleh pusdiklat Mahkamah Agung RI maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Departemen Keuangan

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja, maka diperlukan :

1. Adanya pembinaan sumber daya manusia dalam berbagai bentuk kegiatan bimbingan atau pendidikan atau pelatihan agar dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik

2. Penambahan alokasi anggaran guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana
3. Supaya mengusulkan anggaran perbaikan / renovasi rumah dinas hakim pada tahun anggaran yang akan datang karena sudah banyak yang hancur / rusak berat